



FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA TANGERANG

(Factors that support the existence of a green open space in Tangerang City)

Veny Anisa^{1*}, Christine Wulandari¹, Indra Gumay Febryano¹, Rudi Hilmanto¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung
*email: venyanisa21@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors that support the existence of green open space in Tangerang City. The sampling technique used is a combination of purposive sampling and snowball sampling. Data collection is carried out by structured interviews and then analyze descriptively. The results show that each SKPD has understood the main tasks and functions and SOPs that had to be carried out, communication between the parties is running quite well. In order to fulfill human resource capacity, the Tangerang City Culture and Tourism Office conducts training activities for park police within a certain period of time. However, during the pandemic, there is a delay in the development of green open space due to a 50% budget cut from the government. This budget reduction also affects several green open spaces that are damaged and poorly maintained. Until now, there are no rules for destroying green open space facilities such as vandalism. Therefore, socialization needs to be carried out to the community in order to create mutual awareness of the importance of protecting green open spaces in Tangerang City.

Keywords: city park, green open space, policy, urban forest.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberadaan RTH di Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni kombinasi antara metode purposive sampling dengan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing SKPD telah memahami tupoksi dan SOP yang harus dijalankan, komunikasi antar pihak pun telah berjalan cukup baik. Dalam rangka pemenuhan kapasitas SDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang melakukan kegiatan pelatihan bagi polisi taman dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, pada masa pandemi terjadi penundaan pembangunan RTH oleh karena adanya pemotongan anggaran sebesar 50% dari pemerintah. Pengurangan anggaran ini juga berdampak pada beberapa fasilitas RTH yang rusak dan kurang terawat. Hingga kini, belum ada aturan bagi para perusak fasilitas RTH seperti kegiatan vandalisme. Oleh sebab itu, sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat guna mewujudkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan RTH di Kota Tangerang.

Kata kunci: kebijakan, hutan kota, ruang terbuka hijau, taman kota.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan semakin hari semakin tak terkendali. Seperti di Kota Tangerang, tercatat hingga tahun 2018 jumlah penduduk di kota yang dikenal dengan istilah kota industri ini mencapai 2.185.304 jiwa. Bahkan, diketahui laju pertumbuhan

penduduk dari Tahun 2017-2018 sebesar 2,1% (BPS Kota Tangerang, 2018). Jumlah tersebut akan selalu bertambah mengingat banyaknya penduduk yang memutuskan untuk pindah dan menetap dari desa ke kota (Setyani *et al.*, 2017). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik



(Harahap, 2013). Selain itu, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya turut mendorong aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang-ruang di kawasan perkotaan (Syamdermawan *et al.*, 2012; Subandi *et al.*, 2017).

Bertambahnya jumlah penduduk dalam arus urbanisasi selaras dengan banyaknya kendaraan dan kawasan industri. Berdasarkan Data BPS Kota Tangerang Tahun 2018, diketahui jumlah industri yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Tangerang sebanyak 638 baik itu industri skala besar maupun skala sedang. Kondisi tersebut bersamaan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada tingginya jumlah polusi udara (Harahap, 2013). Oleh sebab itu, menurut Abdullah & Boedisantoso (2019) diperlukan penambahan uang Terbuka Hijau (RTH) dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan banyaknya jumlah transportasi dan industri penyumbang emisi gas CO₂.

Penataan ruang wilayah Kota Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang tahun 2012-2032. Dalam kebijakan ini dikatakan bahwa jumlah proporsi lahan yang wajib dijadikan areal RTH di Kota Tangerang minimal 30% dari luasannya yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Aturan tersebut kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019. Maka dari itu, dalam mewujudkan keberlangsungan RTH yang tepat guna diperlukannya perencanaan dan

pengelolaan yang sesuai RTH berperan penting sebagai paru-paru areal kota (Alifia & Purnomo, 2016). Faktanya di alpangan menunjukkan bahwa pembangunan dan penyediaan RTH di Kota Tangerang masih belum memenuhi jumlah luasan RTH di suatu kota. Menurut Imansari & Khadiyanta (2015) hingga tahun 2015 jumlah luasan RTH di Kota Tangerang masih kurang dari 10%. Jumlah tersebut masih belum memenuhi kriteria minimum sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Belum terpenuhinya kebutuhan RTH di Kota Tangerang menjadi perhatian khusus bagi para implemendor kebijakan RTH. Berdasarkan hal tersebut, menurut Teori Edwards III (1980) dan Wahyudi (2016) beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain: 1). keefektifan komunikasi untuk memudahkan proses penyampaian informasi antar implemendor kebijakan, komunikasi juga menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi antar pihak; 2). sumberdaya yang digunakan menjadi hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan, sebab dari hal ini dapat diketahui sejauh mana konsistensi dan tanggung jawab para implemendor kebijakan dalam melakukan pekerjaan yang efektif; 3). selanjutnya adalah disposisi impelendor, disposisi dapat diartikan sebagai kecenderungan para implemendor kebijakan untuk mampu melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga mengetahui apa saja yang harus dilakukan; 4). variabel yang terakhir adalah struktur birokrasi dalam hal ini adalah ketepatan *Standard Operational Procedure* (SOP), karena implementasi



kebijakan bersifat kompleks sehingga dibutuhkan keseragaman dalam penerapannya. Melalui SOP diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para implementor kebijakan dalam mengefektifkan waktu yang tersedia dan menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberadaan RTH di Kota Tangerang sehingga dapat diketahui apa saja kendala implementor dalam mencukupi kebutuhan RTH.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober-Desember 2020 yang berlokasi di Lingkungan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: panduan wawancara, alat tulis, alat perekam suara, kamera, *laptop*, aplikasi *software microsoft office*, serta dokumen-dokumen terkait kebijakan Tata Ruang dan RTH. Objek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang.

Pemilihan obyek penelitian tersebut mengacu pada pernyataan Sugiyono (2012) bahwa peneliti dapat menetapkan sendiri obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah perpaduan antara *purposive sampling* dengan *snowball sampling*. *Purposive sampling*,

yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam hal ini orang-orang yang *concern* dibidang kebijakan RTH di Kota Tangerang (Ferdinand, 2011). Kemudian, metode tersebut dikombinasikan dengan *snowball sampling* yakni pemilihan sampel berdasarkan hubungan dan garis keterkaitan antar satu pihak dengan pihak lain sampai data dianggap telah cukup (Sugiyono, 2012).

Objek dalam penelitian ini diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pertanyaan terstruktur yang telah dibuat sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mempelajari dan membandingkan data yang didapat dengan kondisi faktual di lapangan secara sistematis (Nazir, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi RTH Kota Tangerang

Luasan RTH terbangun di Kota Tangerang sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 1.489 ha atau sekitar 8,11%. Jumlah tersebut tentu masih kurang dari target pembangunan RTH pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 yang menargetkan sekurang-kurangnya membangun RTH seluas 30% dari luas Kota Tangerang atau setara dengan 5.504,68 ha. Artinya, untuk mencapai standar minimum kebijakan yang berlaku, Kota Tangerang membutuhkan RTH seluas

4.015,68 ha. Perhitungan proporsi lahan RTH di atas dihitung berdasarkan rumus pendekatan luasan wilayah Kota Tangerang (Mbele & Setiawan, 2015).

Penyebab utama belum tercapainya target pembangunan RTH tersebut disebabkan oleh semakin tingginya laju alih fungsi lahan menjadi bangunan industri dan permukiman yang berakibat pada semakin sedikitnya lahan kosong. Problematika ini menjadi persoalan yang tidak pernah lepas dari areal urban. Dengan demikian, pembangunan RTH di areal metropolitan seringkali terkendala dengan lahan kosong yang semakin menyempit. Perencanaannya

pun membutuhkan strategi dan pengembangan khusus agar dapat membatasi pembangunan secara berlebihan (Shani & Kurniawan, 2015).

Menurut Nurhayati (2012), salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyiasati keterbatasan lahan untuk peruntukan RTH, pengelola harus mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada, misalnya *vertical garden* atau *root garden*. Langkah tersebut menjadi alternatif dalam mengefisienkan pemanfaatan RTH. Kondisi beberapa RTH publik di Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kondisi RTH Publik (A) Hutan Kota Tangerang, (B) Taman Pramuka, (C) Taman Bambu dan (D) Taman Kupu-kupu dan Kelinci (*the condition of public green open space (A) Urban forest of Tangerang (B) Scout Park, (C) Bamboo Park and, (D) Butterfly and Rabbit Park.*)

Jenis-jenis Tanaman di Hutan Kota Tangerang

Keberadaan jenis-jenis tanaman di RTH Kota Tangerang khususnya Hutan Kota dianggap sangat penting oleh masyarakat, karena fungsinya dapat mempersejuk lingkungan, menciptakan kenyamanan dan memperindah Kota

Tangerang. Selain itu, pembangunan hutan kota juga akan berjalan efektif apabila jenis-jenis vegetasi yang ditanam mampu menyerap emisi karbondioksida (CO₂) (Endes, 2011). Pernyataan tersebut sejalan dengan Purwasi *et al.*, (2013) yang mengatakan bahwa dalam mengoptimalkan fungsi hutan kota,



pemilihan jenis tanaman penyusunnya harus benar-benar dilakukan secara selektif.

Berdasarkan data Disbudpar Kota Tangerang, jenis-jenis tanaman pengisi Hutan Kota Tangerang antara lain: Trembesi (*Samanea saman*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Dadap (*Erythrina variegata*), Pohon Pelangi/Leda (*Eucalyptus deglupta*), Flamboyan (*Delonix regia*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Glodokan Tiang (*Polyalthia longifolia*), Pangsor (*Ficus callosa*), Palembang Putri (*Roystonea regia*), Sirih Gading (*Epipremnum aureum*), Hanjuang (*Cordyline fruticosa*), Pucuk Merah (*Syzygium paniculatum*), dan jenis-jenis liana serta palem-paleman. Jika dilihat dari manfaatnya, jenis-jenis tanaman RTH di Hutan Kota Tangerang yang cukup beragam dianggap telah sesuai dengan standar ketentuan penyediaan RTH karena dapat berfungsi sebagai peneduh, meredam kebisingan, dan penjerap debu serta polusi (Miranti *et al.*, 2015). Keberagaman jenis-jenis tumbuhan berpotensi dalam menurunkan suhu udara (Ahmad *et al.*, 2012) dan mereduksi CO₂ di udara (Rambarradellangga *et al.*, 2018). Dalam pengembangannya RTH, pemilihan vegetasi penyusun harus dipilih secara selektif dan sebaiknya dipilih jenis-jenis tanaman yang memiliki tajuk lebat untuk memenuhi kebutuhan oksigen di wiayah kota (Ulfa & Fazriyas, 2020).

Tidak hanya pemilihan jenis-jenis tanaman penyusun. Pengelola juga perlu melakukan penataan kembali mengenai jarak tanam dengan mengombinasikan pohon, semak, perdu, dan *cover crop*, karena semakin rapat jarak tanam maka

semakin maksimal pula kapasitas dan kualitas suatu RTH dalam penyerapan polusi (Laksmiwati *et al.*, 2012). Selain berpengaruh terhadap daya serap polusi, kerapatan vegetasi juga berpengaruh nyata dengan temperatur udara (Choirunnisa *et al.*, 2017). jika kerapatan tegakan pohon semakin tinggi, maka suhu udara di bawah pohon akan semakin rendah (Sulistiyana *et al.*, 2017). Pendapat didukung oleh hasil penelitian Sapariyanto *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara kondisi tanaman RTH yang baik dengan penurunan suhu udara. Bersamaan dengan penurunan suhu udara, kerapatan tanaman juga berpengaruh signifikan terhadap kelembaban udara. Sehingga, dapat menambah kesan sejuk dan menenangkan di lingkungan hutan kota (Evert *et al.*, 2017).

Faktor-faktor yang Mendukung Keberadaan RTH di Kota Tangerang

1. Komunikasi antar pihak

Komunikasi menjadi salah satu aspek vital dalam membangun kerja sama antar berbagai pihak baik itu dalam kegiatan formal maupun informal. Jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, dikhawatirkan akan menghambat pencapaian tujuan. Menurut Ramdhani & Suryadi (2005), kemampuan berkomunikasi dibutuhkan agar setiap pihak yang terlibat dapat bertukar pikiran untuk menemukan titik temu kesepahaman dan menemukan cara dalam memecahkan suatu permasalahan.

Pembangunan RTH di Kota Tangerang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang. Untuk merealisasikan terbangunnya RTH publik, berbagai tahapan dilalui mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga



pengelolaan dan pemeliharaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar implementor agar mengefektifkan penyampaian informasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa masing-masing implementor telah cukup baik dalam memahami apa saja peran serta tugasnya. Koordinasi dalam pembangunan RTH berawal dari Bappeda Kota Tangerang yang bekerja sama dengan Dinas PUPR Kota Tangerang, koordinasi ini menghasilkan keputusan perencanaan pembangunan RTH dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi. Keputusan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas LH untuk kemudian dikaji terlebih dahulu apakah lokasi tersebut telah memenuhi syarat dengan melihat faktor-faktor yang menjadi penentu pembangunan RTH. Jika lokasi hijau yang akan dibangun sebagai RTH merupakan milik perseorangan, Dinas LH Kota Tangerang bertugas dalam negosiasi pembebasan lahan tersebut. yang selanjutnya realisasi tahap pembangunan dilakukan oleh Disbudpar Kota Tangerang. Koordinasi yang dilakukan oleh para implementor tidak berhenti sampai di sini dan terus berlanjut hingga pengelolaan RTH.

Selain pengelolaan, penentuan jenis-jenis tanaman pun perlu dikomunikasikan bersama. Menurut Empay Nur Hidayat selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Disbudpar “sejauh ini SKPD yang menentukan jenis-jenis tanaman untuk RTH hanya Disbudpar”. Padahal, untuk menentukan jenis-jenis tanaman yang ideal tentu harus melibatkan berbagai pihak yang memang berkompeten di bidang lingkungan seperti Dinas LH. Karena, rekomendasi pemilihan komposisi

tanaman untuk RTH utamanya dipilih yang tingkat toleransi terhadap pencemar udaranya tinggi (Ergantara & Khikmawati, 2020).

2. Sumberdaya yang Digunakan

Tidak hanya komunikasi, sumberdaya juga menjadi aspek yang krusial dalam setiap perencanaan pembangunan. Bahkan, jika sumberdaya tidak mendukung, pelaksanaan program menjadi tertunda. Menurut Miranti *et al.*, (2015) sumberdaya dapat dibedakan menjadi 2, yakni: sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Kedua sumberdaya tersebut saling memengaruhi karena sebagai fondasi utama dalam mewujudkan *sustainable development*.

Keseluruhan biaya pembangunan dan pengelolaan RTH di Kota Tangerang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Besaran dana yang dianggarkan untuk keperluan RTH tiap tahunnya berbeda-beda, bergantung pada pertimbangan DPRD Kota Tangerang ditinjau dari proposal yang telah diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan hasil evaluasi pencapaian tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Tangerang. Berdasarkan data yang telah didapat, pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang menggelontorkan dana ratusan juta hingga milyaran untuk keperluan RTH. Dana tersebut mencakup biaya pembebasan lahan, biaya pembangunan RTH, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan tanaman, upah petugas kebersihan, kendaraan untuk menyiram tanaman, dan biaya operasional pemeliharaan RTH lainnya.



Eka selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas LH mengatakan “*Dinas LH sendiri selain bertugas dalam pengelolaan juga berperan dalam pembebasan lahan yang akan dijadikan RTH. Anggaran yang diberikan untuk pembebasan lahan digunakan untuk pembelian lahan dan membayar tim penilai tanah. Sebenarnya untuk anggaran ini tidak ada kendala, Namun, yang menjadi kendala adalah belum terpenuhinya kelengkapan administrasi lahan tersebut. Lahan yang dibebaskan akan dibayar setelah adanya kesepakatan antar tim penilai tanah, perwakilan Dinas LH, dan pemilik lahan*”.

Empay Nur Hidayat selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Disbudpar Kota Tangerang mengatakan “*Dana yang sudah dianggarkan ditahun sebelumnya dirasa sudah cukup. Hanya saja, dikarenakan Tahun 2020 ini ada penyebaran virus Covid-19, pemerintah memotong kurang lebih 50% anggaran RTH untuk keperluan pengadaan alat-alat kesehatan seperti: masker, alat pelindung diri (APD), hand sanitizer, biaya perawatan pasien covid, dan lain sebagainya. Sehingga, terjadi penundaan pembangunan RTH dikarenakan anggaran selama masa pandemi diprioritaskan untuk biaya operasional dan kebersihan. Bahkan, upah petugas kebersihan terpaksa harus dikurangi sebesar 30%*”.

Fakta di lapangan menunjukkan, tidak semua fasilitas yang ada di hutan kota dan taman kota terawat dengan baik. Seperti di Taman Kupu-kupu dan Kelinci, fasilitas pengisi daya *handphone* rusak dan tidak bisa terpakai lagi, terlihat dari kondisinya

yang sudah usang dan berkarat. Selain itu, di lokasi yang sama terdapat sampah yang berserakan di selokan air. Hal serupa juga ditemukan di Hutan Kota Tangerang, sampah-sampah terlihat mengapung di pintu air areal Hutan Kota Tangerang. Diperlukan penyusunan strategi untuk peningkatan fungsi fasilitas agar mengoptimalkan jumlah kunjungan (Febryano & Rusita, 2018). Sebab, dalam RTRW Kota, berapapun luas RTH yang dibangun jika tidak diimbangi dengan kualitas yang baik maka fungsinya tidak akan berpengaruh nyata (Rahmy *et al.*, 2012).

Pelaksanaan pembangunan RTH tentu membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya (Nurhanafi *et al.*, 2016). Jumlah tenaga kerja yang tercukupi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam eksistensi hutan. Selain itu, pengelolaan SDM juga perlu diperhatikan agar dapat mengefisiensikan sumberdaya semaksimal mungkin (Wulandari, 2013). Formasi pegawai yang bekerja di Bappeda, Dinas LH, dan Disbudpar telah telah memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan sesuai dengan yang diarahkan. Selain itu, Dinas LH dan Disbudpar juga memiliki polisi taman yang bertugas sebagai pemelihara lingkungan RTH Publik dengan membersihkan areal RTH, menyiram tanaman yang ada di RTH, memotong rumput-rumput liar, dan lain sebagainya.

Empay Nur Hidayat selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Disbudpar Kota Tangerang mengatakan “*Penambahan kapasitas SDM*



biasanya diadakan untuk polisi taman, yang tadinya belum memiliki keterampilan dilatih sampai setidaknya bertambah kemampuannya. Biasanya kegiatan yang dilakukan, yakni: pelatihan melukis/mural art dan pelatihan alat pertukangan. Jumlah anggota polisi taman rencananya akan ditambah, yang semula berjumlah 57 orang, akan ditambah 3 orang menjadi 61 orang. Penambahan jumlah polisi taman ini sendiri diharapkan akan berpengaruh baik dengan semakin terawatnya fasilitas dan kebersihan pun terjaga”.

3. Disposisi Implementor

Disposisi merupakan sikap dan komitmen para implementor RTH dalam merealisasikan pembangunan RTH. Hal ini berguna untuk mengetahui konsistensi implementor dalam bekerjasama mencapai tujuan (Miranti *et al.*, 2015). Disposisi berpengaruh dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan sebuah program (Dewi & Agustina, 2020). Sejauh ini, seluruh SKPD yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH berpegang teguh pada pedoman RTRW yang telah dibuat.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan RTH selalu diadakan monitoring dan evaluasi untuk mengawasi jalannya program RTRW Kota Tangerang. Monitoring dan evaluasi di Bappeda dilakukan setiap akhir tahun oleh bagian pengendalian dan pengawasan, dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Berbeda halnya dengan Bappeda, Disbudpar selalu mengadakan monitoring dan evaluasi setiap bulan secara menyeluruh, apakah kondisi RTH masih dalam keadaan baik, apa saja fasilitas yang perlu diperbaiki atau

ditambah jumlahnya. Akan tetapi, pelaksanaan evaluasi ini harus terlebih dahulu direncanakan, tidak spontan begitu saja. Namun, ternyata sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya RTH sampai saat ini belum dilakukan. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham fungsi dari RTH. Padahal, sosialisasi ini penting untuk turut mendukung terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemberian informasi tentang RTH sangat diperlukan guna membentuk pengetahuan publik akan pentingnya RTH.

4. Ketepatan Prosedur

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan suatu program membutuhkan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Fungsi dari *SOP* sebagai acuan dalam pengambilan keputusan agar kegiatan berjalan sistematis dan terarah (Tambunan, 2013). Masing-masing pihak yang turut serta dalam pelaksanaan pembangunan RTH di Kota Tangerang wajib menjalankan tugas sesuai dengan *SOP* yang telah ditentukan. Adapun hasil yang didapat dilihat dari ketepatan prosedur adalah sebagai berikut: 1). Setiap harinya, masing-masing bidang di SKPD menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan dapat dilihat dari kejelasan pembagian bidang-bidang yang mengurus RTH. 2). Segala urusan yang berkaitan RTH selalu mengutamakan *SOP* yang ada. Misalnya terjadi pelanggaran berupa *vandalism* atau mencoret tembok fasilitas RTH secara *illegal*, biasanya Disbudpar bersama Satpol PP melakukan razia bagi para oknum *vandalism* tersebut dengan mendata, dan memberikan imbauan



atau peringatan. Sejauh ini, belum ada sanksi tegas terkait *vandalism* ini. Maka dari itu, sebaiknya para implementor membuat aturan tertulis terkait apa saja hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam lingkungan RTH di Kota Tangerang.

KESIMPULAN

Koordinasi yang terjalin antar SKPD telah berjalan cukup baik sehingga masing-masing pihak memahami apa saja tupoksi dan SOP yang harus dijalankan. Selain itu, adanya penambahan kapasitas SDM petugas kebersihan (polisi taman) dengan dilakukannya pelatihan pertukangan secara rutin. Namun, selama masa pandemi, anggaran untuk keperluan RTH dikurangi hingga 50%. Hal tersebut berdampak pada penundaan pembangunan RTH dan kurang terawatnya beberapa fasilitas yang ada. Terkait aturan pelanggaran, sejauh ini belum adanya aturan tegas yang dibuat untuk para perusak fasilitas RTH. SKPD perlu memberi perhatian lebih dalam menjaga stabilitas kondisi sarana prasarana RTH. Sosialisasi pentingnya RTH juga sangat diperlukan agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan *vandalism* atau kegiatan lain yang dapat merusak kondisi lingkungan RTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Boedisantoso, R. (2019). Perhitungan ruang terbuka hijau berdasarkan emisi karbon dioksida. *J. Pijar Mipa*, 14(1), 95-99. <https://doi.org/10.29303/jpm.v14i1.997>
- Ahmad, F., Arifin, H., Dahlan, E., Effendy, S., & Kurniawan, R. (2012). Analisis hubungan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perubahan suhu di Kota Palu. *J. Hutan Tropis*, 13(2), 173-180. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i2.1533>
- Alifia, N., & Purnomo, Y. (2016). Identifikasi letak dan jenis ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan. *Langkau Betang: J. Arsitektur*, 3(2), 25-38. <http://dx.doi.org/10.26418/langang.v3i2.18329>
- Choirunnisa, B., Setiawan, A., & Masruri, N.W. (2017). Tingkat kenyamanan di berbagai taman kota di Bandar Lampung. *J. Sylva Lestari*, 5(3), 48-57. <http://dx.doi.org/10.23960/jsl3548-57>
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2020). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. *J. Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 129-135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007>
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing Public Policy..* Congretional Quarterly Press. Texas A & M University. Washington Dc.
- Endes, D. N. (2011). Kebutuhan luasan areal hutan kota sebagai resor (*sink*) gas CO₂ untuk mengantisipasi penurunan luasan ruang terbuka hijau di Kota Bogor. *Forum Geografi*, 25(2), 164-177. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v25i2.5043>
- Ergantara, R. I., & Khikmawati, E. (2020). Analisis pemilihan jenis tanaman penyerap emisi udara dalam mendukung ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *J. Rekayasa, Teknologi, dan Sains*, 4(1), 7-12. <https://doi.org/10.33024/jrets.v4i1.2186>



- Evert, A., Yuwono, S. B., & Duryat. (2017). Tingkat kenyamanan di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi. *J. Sylva Lestari*, 5(1), 14-25.
<http://dx.doi.org/10.23960/jsl1514-25>
- Febryano, I. G., & Rusita. (2018). Persepsi wisatawan dalam pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *J. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(3), 376-382.
<https://doi.org/10.29244/jpsl.8.3.376-382>
- Ferdinand, A. (2011). *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen Edisi 3 AGF Books*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35-45.
<https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *J. Ruang*, 1(3), 101-110.
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang>
- Laksmiwati, T., Chairil, B. A., & Wulan. A. (2013). Evaluasi ruang terbuka di Kampus Universitas Brawijaya. *J. Ruas*, 11 (1), 334-347.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.ruas.2013.011.01.1>
- Mbele, M. F. B., & Setiawan, R. P. (2015). Kriteria penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Malang. *J. Teknik ITS*, 4(2), 1-3.
<http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v4i2.10901>
- Miranti, M. Sundarso, S., & Purnaweni, H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang. *J. of Public Policy and Management Review*, 4(2), 393-404.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.8271>
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang. *J. of Public Policy and Management Review*, 5(2), 857-872.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11274>
- Nurhayati, H. (2012). *Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen (Studi Kasus Kota Semarang)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Purwasih, H. Latifah, S., & Sukmana, A. (2013). Identifikasi jenis tanaman di beberapa jalur hijau jalan Kota Medan. *Peronema Forestry Science*, 2(2), 108-116.
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, studi kasus di wilayah Tegallega, Bandung. *J. Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27-38.
- Rambaradellangga, A., Herlina, N., & Ariffin, A. (2019). Analisis kemampuan rth dalam mereduksi CO₂ dan suhu udara serta pengaruhnya terhadap tingkat



- kenyamanan Kampus Universitas Brawijaya. *J. Produksi Tanaman*, 6(10), 2482-2490.
- Sapariyanto, S., Yuwono, S. B., & Riniarti, M. (2016). Kajian Iklim Mikro Di Bawah Tegakan Ruang Terbuka Hijau Universitas Lampung. *J. Sylva Lestari*, 4(3), 114-123.
<http://dx.doi.org/10.23960/jsl34114-123>
- Setyani, W., Sitorus, S.R.P., & Panuju, D.R. (2017). Analisis ruang terbuka hijau dan kecukupannya di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1(1), 121-127.
- Shani, F. M., & Kurniawan, A. (2015). Kajian ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Sukabumi. *J. Bumi Indonesia*, 4(4), 1-8.
- Subandi, S. (2017). Sistem informasi geografis sebagai pendukung penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Kota Banjarmasin. *Positif: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 3(2), 106-112.
<https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.424>
- Sulistiyana, M. I. C. D., Yuwono, S. B., & Rusita, R. (2017). Kenyamanan Hutan Kota Linara berbasis kerapatan vegetasi, iklim mikro dan persepsi masyarakat di Kota Metro. *J. Sylva Lestari*, 5(2), 78-87.
<http://dx.doi.org/10.23960/jsl2578-87>
- Sugiyono. (2012). *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Syamdermawan, W., Surjono, S., & Kurniawan, E.B. (2012). Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap kualitas lingkungan pada perumahan menengah atas. *J. Teknologi dan Kejuruan*, 35(1), 81-92.
<http://dx.doi.org/10.17977/tk.v35i1.3709>
- Tambunan, R. M. (2013). *Standart Operating Procedures (SOP)*. Maiestas Publishing. Jakarta.
- Ulfa, M., & Fazriyas, F. (2020). Ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi berbasis jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen. *J. Sylva Lestari*, 8(3), 366-377.
<http://dx.doi.org/10.23960/jsl38366-377>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *J. Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99-103.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.1>
- Wulandari, C. (2013). Factors influencing sustainability in customary forest. *IASC 2013-14th Global Conference of the International Association for the Study of the Commons*, Kita Fuji Jepang, 3-7 Juni 2013.